

MODAL POLITIK H. SUKARMIS PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DAPIL VIII RIAU

Oleh:

FITRI RAMADHANI

E-mail: ramadhanifitri1812@gmail.com

Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Political capital is a force that legislative candidates must have when they want to compete in a democratic party. Because political capital in the form of economic capital, social capital, cultural capital, and symbolic capital is very effective in winning political contestation. The method used in writing this research is a qualitative approach. Meanwhile, the keyinformants used were 7 people. Data collection methods are by using interviews and documentation. The findings prove that the synergy of various political capitals is very significant in determining one's victory in political contestation and at the same time giving high-cost political burdens to legislative candidates. The case of H. Sukarmis' victory in the political contestation of the legislative elections in the Electoral District VIII in 2019 has proven the importance of politics. H. Sukarmis had the advantage of social and cultural capital that his political opponents had never imagined, so he was able to displace other powerful figures who rely more on symbolic and economic capital alone. This proves that social capital economic capital, cultural capital, and symbolic capital, must be combined to win political contestation, especially general elections. Because if one capital is not used optimally, it will tend to have an impact on other capital. For example, a lack of social capital will increase campaign costs.

Keywords: Economic Capital, Social Capital, Cultural Capital, Symbolic Capital.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Konteks Demokrasi telah mengharuskan setiap proses pemilihan wakil rakyat, baik dalam bentuk eksekutif maupun dalam bentuk legislatif harus melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Sehingga pada saat ini, suara masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pemilihan wakil rakyat. Kondisi ini mengharuskan setiap partai politik dan juga calon wakil rakyat yang ingin dipilih oleh masyarakat harus memiliki kekuatan dalam menghadapi partai politik maupun calon perorangan lainnya.

Dalam menghadapi pemilu seperti pemilihan anggota legislatif, maka banyak faktor yang harus menjadi fokus para kandidat peserta pemilihan anggota legislatif tahun 2019. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh setiap kandidat calon legislatif adalah tentang modal yang dimiliki oleh calon legislatif. Hal ini dikarenakan kompetisi pada arena politik tidak hanya mencakup ruang persaingan antara partai saja namun lebih menonjolkan sosok figurative dari kandidat tersebut seperti ketokohan, popularitasnya dan moralitas yang tercorak, serta historis latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Modal ini juga merupakan sebuah bangunan relasi dan kepercayaan (trust) yang harus dimiliki oleh calon legislatif. Dengan kata lainnya bahwa jelas modal politik ialah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, karena saling berkaitan erat satu sama yang lain. Secara definisi konseptual tentunya metafora terserbut tergambar dari tiga modal utama yang harus dimiliki oleh para calon yang nantinya akan mengikuti kontestasi dalam sebuah pemilukada. Modal politik dalam kontestasi politik tidak ditentukan figur dan modal politik kandidat saja, tapi juga di tentukan peran dukungan.

H. Sukarmis merupakan salah satu anggota legislatif terpilih untuk DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan VIII, yang meliputi Kabupaten Kuantan Singingi dan

Juga Indragiri Hulu. Pada pemilihan umum tahun 2019, H. Sukarmis harus bersaing dengan calon legislatif dari partai Golongan Karya (Golkar), dan juga calon legislatif dari partai-partai lainnya. Berdasarkan pada Daftar Calon Tetap (Daftar Calon Tetap) KPU Provinsi Riau, maka daerah pemilihan (Dapil) VIII yang meliputi Indragiri hulu dan Kuantan Singingi memiliki Daftar Calon Tetap sebanyak 117 orang. Melihat banyaknya calon anggota legislatif yang berasal dari Dapil VIII ini, maka H. Sukarmis benar-benar harus memiliki modal politik yang bagus, karena beliau tidak hanya harus mendapatkan suara dari daerahnya, tetapi juga harus mendapatkan suara dari Kabupaten Indragiri Hulu.

Keberhasilan H. Sukarmis dalam konteks pemilihan umum legislatif, maka dapat dilihat dari perolehan suara yang diraih oleh H. Sukarmis. maka dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Dapil VIII Provinsi Riau Periode 2019-2024

No	Partai	Suara	
		Indragiri hulu	Kuantan Singingi
1	H. Sukarmis	2,882	34,510
2	Yulisman M.Si	20,102	570
3	Hj. Wisma Happy, SE, MM	12,062	424
4	Indra Putra, ST	1,548	2,597
5	Mardiana, S.Sos	523	189
6	Dedi Hendra	402	90
7	Anggi Indra	206	113
8	Risma Hadiyanti Putri	571	85
9	Suara Partai	3.869	3.427
Jumlah		42,165	42,005

Sumber: KPU Provinsi Riau, 2019

Berdasarkan pada Tabel 1.2. maka dapat dilihat bahwa perolehan suara H. Sukarmis paling tinggi adalah di Daerah Kuantan Singingi, dengan perolehan sebanyak 34,510. Melihat perolehan suara yang dimiliki oleh H. Sukarmis pada pemilihan anggota legislatif tahun 2019, maka dapat dikatakan bahwa H. Sukarmis

telah berhasil untuk meraih perolehan suara dari daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Sementara itu, untuk daerah Indragiri Hulu, yang merupakan sama-sama daerah pemilihan VIII, maka perolehan suara H. Sukarmis masih kalah jauh dibandingkan calon legislatif lainnya. seperti Yulisman, S.Si, dan Hj. Wisma Happy, SE, MM, kedua calon tersebut merupakan calon legislatif yang berasal dari daerah Indragiri Hulu. Sehingga memiliki kedekatan dengan masyarakat setempat. Dengan demikian, maka perlu dikaji tentang politik yang dimiliki oleh H. Sukarmis, karena masih kalah untuk daerah pemilihan Indragiri Hulu.

Keberhasilan H. Sukarmis dalam memperoleh suara pada Kabupaten Kuantan Singingi, dan kegagalannya memaksimalkan perolehan suara pada Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, mengharuskan H. Sukarmis untuk mengevaluasi modal politik yang dimiliki dalam pemilihan anggota legislatif, sehingga kelemahan-kelemahan yang dimiliki dapat diantisipasi.

Bourdieu (1986) mengakui tiga "samaran" dasar atau jenis modal utama: modal ekonomi (uang dan properti), modal budaya (barang dan jasa budaya termasuk kredensial pendidikan), dan modal sosial (kenalan dan jaringan). Dia juga menaruh banyak perhatian pada bentuk kapital keempat - kapital simbolik (legitimasi). Mengutamakan bentuk-bentuk kapital tertentu ini sebagai yang primer (atau setidaknya secara teoritis ringkas) konseptualisasi kapital Bourdieu (dan karenanya jenis-jenis kapital) dapat diperluas ke semua bentuk kekuasaan, tidak peduli sumbernya. (Casey, 2018)

Modal utama yang harus dimiliki para kandidat anggota legislatif yang hendak mengikuti kontestasi di dalam pemilihan umum 2019, yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Seorang Calon Anggota Legislatif memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal, semakin besar pasangan calon yang mampu

mengakumulasi empat modal itu, maka semakin berpeluang terpilih sebagai anggota legislatif. Peluang terpilihnya kandidat anggota legislatif merupakan bagian dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah satu faktor saja atau modal politik tertentu. Dalam penelitian ini memfokuskan pada teori modal sosial, modal budaya, modal politik, dan modal ekonomi, sehingga memiliki porsi uraian teoritik yang lebih kuat dan mendalam.

Modal utama yang harus dimiliki para kandidat anggota legislatif yang hendak mengikuti kontestasi di dalam pemilihan umum 2019, yaitu modal ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi dan donatur, dan berdasarkan penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye dan beli suara, untuk kemenangan calon legislatif. Selain harta kekayaan sendiri, modal ekonomi H. Sukarmis juga didukung oleh anak-anaknya yang berlatarbelakang sebagai kontraktor, dan juga politisi (Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi).

Modal ekonomi yang harus dikeluarkan oleh H. Sukarmis pada saat pemilihan anggota legislatif tahun 2019 sebenarnya tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan pada saat kampanye, H. Sukarmis melakukan kerja sama politik dengan calon anggota legislatif pada tingkat Kabupaten. Sehingga pada saat kampanye calon anggota legislatif, H. Sukarmis bisa sekaligus kampanyekan dirinya.

Selain itu, modal ekonomi yang dimiliki oleh H. Sukarmis pada saat pemilihan umum tahun 2019, sudah baik, karena beliau merupakan seorang pengusaha (kontraktor) yang memiliki kekayaan, baik berupa perusahaan, perkebunan, maupun harta kekayaan lainnya. Sehingga H. Sukarmis tidak mengalami hambatan pendanaan pada saat mengikuti kontekstasi pemilihan umum tahun 2019.

Selanjutnya modal politik yang harus dimiliki oleh H. Sukarmis adalah modal

sosial. modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”. Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk bentuk social capital (modal sosial).

Sebagai salah satu tokoh politik, maka H. Sukarmis harus mampu untuk memaksimalkan setiap modal politik yang dimilikinya. Salah satunya adalah berkaitan dengan modal social. Modal sosial adalah jaringan dan kepercayaan masyarakat yang dimiliki oleh H. Sukarmis, contohnya H. Sukarmis mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin Kabupaten Kuantan Singingi Selama Dua periode, sebagai Bupati. Kepercayaan masyarakat terlihat dari terpilih sebagai Bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2006. Pada tahun 2006. Pada pemilihan tersebut H Sukarmis berdampingan dengan Drs H Mursini sebagai calon yang diusung Partai Golkar, Partai PPP, Partai PBB. Tercatat dari empat pasangan calon yang menduduki peringkat tertinggi berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD adalah pasangan H. Sukarmis-Mursini dengan total perolehan 61.679 suara. (Sarjan, 2012)

Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011, maka H. Sukarmis kembali mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpasangan dengan Drs. H. Zulkifli, M.Si. berhadapan dengan pasangan Drs. H. Mursini, M.Si dan Gumpita, SP, M.Si. Pada pemilihan 2011 ini kembali H. Sukarmis dan Drs. H. Zulkifli, M.Si kembali terpilih dengan perolehan suara sebanyak 82.504 (54,25%), sementara itu pasangan Drs. H. Mursini, M.Si dan Gumpita, SP, M.Si

mendapatkan suara sebanyak 69.600 (45,75%)

Kemampuan H. Sukarmis untuk menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kuantan Singingi selama dua periode membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap H. Sukarmis masih bagus. Namun, ketika H. Sukarmis mencoba untuk mengusung salah satu calon bupati, pada pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017, yakni dengan mengusung pasangan calon Indra Putra dan Konprensi (IKO). Pada saat mendukung pasangan (IKO), H. Sukarmis didukung oleh beberapa partai lainnya, seperti Demokran, PAN, NasDem, Hanura. Pasangan IKO harus bersaing dengan dua pasangan lainnya, seperti: Mursini dan Halim, serta Mardjan Ustha dan Halim. Berdasarkan pada hasil pleno KPU, maka Pasangan Nomor Urut 2, Mursini-Halim (MH) memenangkan dengan selisih suara sebanyak 348 dari pasangan Indra Putra dan Konprensi (IKO). Pasangan Indra Putra dan Konprensi (IKO) mendapatkan 63.196 dan Mursini dan Halim (MH) mendapatkan suara sebanyak 63.544. (Susandi, 2015)

Berdasarkan pada perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dilihat bahwa Modal politik H. Sukarmis masih belum mampu untuk memenangkan pasangan calon bupati yang diusungnya. Selain itu, pada perolehan suara pemilihan anggota legislative tahun 2019, maka perolehan suara untuk Kabupaten Indragiri Hulu hanya 2,882, sedangkan pada Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 34,510 suara. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap H. Sukarmis hanya sebatas pada masyarakat Kuantan Singingi saja. Oleh karena itu, untuk politik yang sangat dinamis, maka H. Sukarmis harus mampu meningkatkan modal sosial yang dimiliki. Salah satu kelemahan H. Sukarmis adalah kemampuannya untuk meyakinkan pemilih pemula untuk memilihnya.

Lemahnya H. Sukarmis dalam mendapatkan suara pemilih pemula ini harus

diantisipasi, karena Pemilih pemula menjadi sasaran strategis karena berbagai alasan. Pertama, jumlah pemilih pemula dalam setiap Pemilu cukup besar. Kedua, mereka adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang baru pertama kalinya memberikan suara dalam Pemilu sehingga perlu diberi arahan yang baik agar memiliki pemahaman yang baik pula terhadap demokrasi. Ketiga, mereka adalah calon pemimpin masa depan sehingga dengan menggali dan mengetahui pandangan mereka tentang demokrasi, kita dapat memberikan apa yang mereka butuhkan sebagai bekal di masa depan. (Manik, 2014)

Kelemahan H. Sukarmis lainnya adalah kurangnya kemampuan yang dimiliki untuk mengelolah media sebagai modal politik. Media saat ini tidak hanya didominasi oleh media televisi dan Koran saja, namun pada saat ini banyak dari masyarakat mengakses informasi dari media internet. Sehingga setiap aktor politik harus memiliki kemampuan untuk mengelolah media informasi menggunakan internet, terutama media sosial seperti facebook, whatsapp, instagram, maupun media sosial lainnya. Karena berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Batari dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Penggunaan media sosial dilakukan dalam hal pembentukan citra/pencitraan, serta sosialisasi dan koordinasi. Dari pemanfaatan tersebut, kecenderungan respon yang mereka terima dari netizen, baik yang bersifat positif, maupun yang negatif. Ditandai dengan pemberian komentar yang sifatnya mendukung, juga respon berupa saran dan masukan diberikan sebagai sarana perbaikan untuk kepemimpinan mereka kedepan. (Batari, 2017)

Selain itu, modal yang harus dimiliki oleh H. Sukarmis adalah modal budaya. Modal budaya, memungkinkan kita untuk memperoleh kesempatan dalam hidup, karena modal budaya menghasilkan kesetaraan maupun ketidaksetaraan yang akan selalu termotivasi bagi manusia untuk

memenuhi kebutuhannya untuk mencapai suatu kelas sosial tertentu. Contohnya H. Sukarmis merupakan salah satu tokoh masyarakat yang mendapat gelar Datuk Bagindo Kayo karena Bupati Sukarmis dianggap memberi perhatian penuh serta peran yang besar dalam meningkatkan pembangunan di kawasan Pucuk Rantau hingga mendukung terbentuknya kecamatan Pucuk Rantau pemekaran dari Kecamatan Kuantan Mudik. Selain itu, beliau juga diberikan Gelar Bapak Pembangunan oleh Drs. Hamdan, MS Dt Paduko Jolelo, Salah satu penghulu Kenegerian Simandolak Benai.

Dengan adanya gelar dari tokoh masyarakat tersebut, seharusnya mampu dioptimalkan untuk mendapatkan suara masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif, baik di daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maupun di Kabupaten Indragiri Hulu. Namun pada kenyataannya suara H. Sukarmis hanya berasal dari daerah Kabupaten Kuantan Singingi saja, Hal ini menandakan ketokohan H. Sukarmis hanya pada masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi saja. Oleh karena itu, perlu untuk peningkatan modal sosial yang dimiliki oleh H. Sukarmis.

Modal Terakhir yang harus dimiliki oleh seorang calon legislative adalah terkait dengan modal simbolik. Modal simbolik adalah jenis sumber daya yang dioptimalkan dalam meraih kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik sering membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor, prestise, gelar, satus tinggi, dan keluarga ternama. Artinya modal simbolik di sini dimaksudkan sebagai semua bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara institusional atau non-institusional.

Modal simbolik yang dimiliki oleh H. Sukarmis saat ini dapat dilihat dari lingkungan keluarga yang memiliki jabatan, baik sebagai pegawai negeri sipil maupun di Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai keluarga pengusaha yang memiliki beberapa perusahaan. Sementara itu, untuk status sosial yang

disandingkan kepada H. Sukarmis sudah banyak diakui oleh masyarakat, seperti dengan pemberian gelar Datuk kepada H. Sukarmis, seperti gelar Datuk Bagindo Kayo.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa saja modal politik yang digunakan H. Sukarmis pada pemilihan umum legislatif 2019 Dapil VIII Riau?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui modal politik yang digunakan H. Sukarmis pada pemilihan umum legislatif 2019 Dapil VIII Riau.

D. KERANGKA TEORI

Bourdieu (1986) mengakui tiga "samaran" dasar atau jenis modal utama: modal ekonomi (uang dan properti), modal budaya (barang dan jasa budaya termasuk kredensial pendidikan), dan modal sosial (kenalan dan jaringan). Dia juga menaruh banyak perhatian pada bentuk kapital keempat - kapital simbolik (legitimasi). Mengutamakan bentuk-bentuk kapital tertentu ini sebagai yang primer (atau setidaknya secara teoritis ringkas) konseptualisasi kapital Bourdieu (dan karenanya jenis-jenis kapital) dapat diperluas ke semua bentuk kekuasaan, tidak peduli sumbernya. **Invalid source specified.**

Modal terdiri dari ekonomi, sosial, budaya dan simbolik. Modal sosial, budaya dan simbolik tidak dapat direduksi dalam modal ekonomi, karena setiap bentuk modal memiliki spesifikasinya masing-masing. Namun akhirnya modal ekonomi menjadi akar dari itu semua **Invalid source specified..**

1. Modal Ekonomi

Pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang. Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik. Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai "penggerak" dan "pelumas" mesin politik yang dipakai. Didalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya. (Potouw, 2010)

2. Modal Sosial

Modal sosial memiliki peran yang sangat penting bahkan tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal yang lain. Dengan memiliki modal sosial yang tinggi, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih (voters). Namun melalui pengenalan-pengenalan itu, lebih-lebih pengenalan secara fisik dan sosial secara dekat, para pemilih bisa melakukan penilaian apakah pasangan yang ada itu layak untuk dipilih atau tidak. Apabila seorang calon dikatakan memiliki modal sosial, berarti calon itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat, tetapi juga diberi kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin. **Invalid source specified.**

Di lain hal dalam mendefinisikan modal sosial diukur dalam tiga cara. Dukungan kelompok kolektif calon diukur dengan jumlah dukungan kandidat lain menerima. Pengukuran ini juga akan menyertakan dukungan dari individu, dengan asumsi bahwa dukungan individu membawa pada dukungan kolektif, bukan hanya mewakili individu memberikan dukungan tersebut. Pengukuran kedua menunjukkan ikatan pribadi calon

kelompok- kelompok di mana kandidat langsung berpartisipasi di luar partai politik. Kelompok tersebut misalnya, akan kelompok-kelompok sipil lokal, keanggotaan gereja, asosiasi profesional, dan klub. Pengukuran ketiga dari modal sosial adalah pengakuan nama. Pengukuran ini menunjukkan seberapa dikenal calon dalam asosiasi-nya **Invalid source specified.**

3. Modal Budaya

Modal budaya, memungkinkan kita untuk memperoleh kesempatan dalam hidup, karena modal budaya menghasilkan kesetaraan maupun ketidaksetaraan yang akan selalu termotivasi bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya untuk mencapai suatu kelas sosial tertentu. Modal sendiri dapat diperoleh jika individu memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya. Bagi kebudayaan Indonesia, pemikiran Bourdieu memberikan manfaat signifikan dalam upaya memahami dan menganalisis kesenjangan sosial-budaya, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat, karena modal budaya dan habitus memberi pencerahan terhadap bentuk dan struktur budaya. Hal ini relevan dengan masyarakat Indonesia yang mengenal yang namanya kelas sosial, dimana individu yang memiliki status sosial tinggi lebih dihormati dan dikenal daripada individu yang memiliki status sosial rendah. (Baharuddin, 2017)

4. Modal Simbolik

Modal simbolik adalah jenis sumber daya yang dioptimalkan dalam meraih kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik sering membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor, prestise, gelar, status tinggi, dan keluarga ternama. Artinya modal simbolik di sini dimaksudkan sebagai semua bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara institusional atau non-institusional. Simbol itu sendiri memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas, yang mampu

menggiring orang untuk mempercayai, mengakui dan mengubah pandangan mereka tentang realitas seseorang, sekelompok orang, sebuah partai politik, atau sebuah bangsa (Halim, 2014).

Proses kuasa simbolik bisa disebut terjadi saat otonomi ranah tersebut melemah sehingga memungkinkan munculnya pemikiran lain yang disampaikan agen-agen dalam ranah tersebut untuk mempertanyakan, menantang, atau bahkan menggantikan doksa yang dimaksud. Pada titik ini, Bourdieu menyebut konsep heterodoksa dan ortodoksa. Pemikiran “yang menantang” tersebut disebutnya sebagai heterodoksa, yaitu pemikiran yang disampaikan secara eksplisit yang mempertanyakan sah atau tidaknya skema persepsi dan apresiasi yang tengah berlaku. Sedangkan ortodoksa merujuk pada situasi di mana doksa dikenali dan diterima dalam praktik. Dengan kata lain, kelompok dominan yang memiliki kuasa berusaha mempertahankan struktur ranah yang didominasinya dengan memproduksi ortodoks **Invalid source specified.**

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sasaran kajian atau penelitian adalah gejala-gejala sebagai saling terkait satu sama lainnya dalam hubungan fungsional dan yang keseluruhannya merupakan sebuah satuan yang bulat dan menyeluruh dan holistik serta sistematis. **Invalid source specified.**

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan Lokasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah dikarenakan H. Sukarmis merupakan calon anggota legislatif yang berasal dari Daerah Pemilihan VIII, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang di perlukan oleh seorang peneliti yang di peroleh dari sumber utama secara langsung. Mewawancarai langsung dengan pihak terkait yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan yang di angkat guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan penelitian ini. **Invalid source specified..** Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan meliputi tentang modal politik H. Sukarmis pada pemilihan umum legislatif 2019 Dapil VIII Riau.

b. Data Sekunder

Data yang di peroleh dari sumber yang sifat datanya sudah didokumentasikan oleh instansi atau perusahaan dan hasil-hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini. **Invalid source specified.** Data yang dicari yaitu sejarah Kabupaten Kuantan Singingi, dan Profil H. Sukarmis.

4. Sumber Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur *purposive*. Dimana teknik prosedur *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 95). Adapun sumber data tersebut adalah informan dan dokumen. Informan penelitiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Padhil Muhammad	Tim Sukses H. Sukarmis	1
2	Andi Putra	Ketua DPRD Kuantan Singingi/Ketua DPD II Golkar	1
3	Akhyan Armofis	Camat Sentajo Raya	1
4	Masdar	Sekjen Golkar Kuansing	1
5	Drs. Hamdan, MS Dt Paduko Jolelo	penghulu Kenegerian Simandolak Benai	1
6	Ali Hasim	Pemuka adat Pucuk	1

	Datuk Paduko Rajo	Rantau	
7	Agus Sunaryo	Wakil Ketua Majelis Perwakilan Cabang NU Sentajo Raya,	1

Sumber: Olahan Penulis, 2020.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam **Invalid source specified.** mencakup tiga kegiatan yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) simpulan.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Kacung, (2006) ada tiga modal utama yang harus dimiliki, yakni modal politik (*political capital*), modal sosial (*social capital*) dan modal ekonomi (*economical capital*). Ketiga modal itu dapat mempengaruhi seorang kontestan dalam memperoleh dukungan dari masyarakat. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kontestan maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh.

Sementara itu, Menurut (Pierre Bourdieu (1986), dalam **Invalid source specified.** terdapat beberapa modal dalam pemilihan anggota legislatif 2019, yaitu sebagai berikut

1. Modal Ekonomi

Untuk menilai modal ekonomi yang dimiliki oleh H. Sukarmis, maka dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini:

a. Dukungan Dana

H. Sukarmis memiliki dana kampanye pribadi, maupun yang disumbangkan oleh donator-donatur, hal ini tentu saja membuat modal yang dimiliki oleh H. Sukarmis menjadi lebih kuat. Selain itu, bantuan juga datang dari kerja sama yang dijalin dengan calon anggota legislatif tingkat kabupaten, yaitu dengan berkolaborasi untuk kampanye bersama. Hal ini tentu saja membuat pengeluaran untuk kampanye menjadi lebih sedikit. Adapun rincian dana kampanye yang dimiliki dan digunakan oleh H. Sukarmis adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Laporan Dana Kampanye H. Sukarmis

No	Keterangan	Masuk	Keluar
1	Dana Pribadi H. Sukarmis	Rp1,875,000,000	
2	Sumbangan Partai	Rp 75,000,000	
3	Sumbangan Donatur Pribadi	Rp 127,250,000	
4	Sumbangan Donatur Perusahaan	Rp 482,750,000	
Total Penerimaan		Rp2,560,000,000	
5	Kegiatan Bakti Sosial		Rp 285,750,000
6	Pembuatan Alat Peraga Kampanye		Rp 375,450,000
7	Operasional Tim Media Sosial		Rp 85,430,000
8	Operasional Tim Kampanye		Rp 567,490,000
9	Pengamanan Kampanye		Rp 125,900,000
10	Biaya Kampanye Terbuka		Rp 329,030,000
11	Santunan Sosial		Rp 124,300,000
12	Operasional Pengawas Hasil Pemilihan		Rp 140,090,000
13	Biaya Operasional Kegiatan lainnya		Rp 439,280,000
			Rp2,472,720,000
Sisa/Kekurangan Dana Kampanye		Rp 87,280,000	

Sumber: **Invalid source specified.**

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka dapat dilihat bahwa dana kampanye yang diperoleh oleh H. Sukarmis bersumber dari dana pribadi, dana partai, dan bantuan dari donator. Sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan kampanye sesuai

dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, dana kampanye tersebut masih ada sisanya, hal ini menunjukkan bahwa modal H. Sukarmis dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2019-2024 ini sudah kuat. Namun disisi lainnya dana kampanye yang dimiliki H. Sukarmis masih bersumber dari berbagai donator, artinya secara kemampuan pribadi H. Sukarmis masih belum terlalu memiliki modal yang kuat.

b. Dukungan Materi Untuk Kampanye

Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh H. Sukarmis, bisa terlaksana dengan baik, karena peran serta dari seluruh pihak, terutama dari pihak partai Golkar. Partai Golkar mengerahkan seluruh potensi yang ada, baik itu materi dalam bentuk finansial, ide atau gagasan, maupun dari kader untuk menyukseskan proses kampanya.

Modal Ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi dan donatur, dan berdasarkan penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye dan beli suara, untuk kemenangan calon legislatif. Selain harta kekayaan sendiri, modal ekonomi H. Sukarmis juga didukung oleh anak-anaknya yang berlatarbelakang sebagai kontraktor, dan juga politisi (Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Sementara itu, untuk materi kampanye, maka H. Sukarmis mendapatkan dukungan dari partai dalam hal alat peraga kampanye, iklan kampanye dan bahan kampanye. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa penggunaan dana kampanye yang bersumber dari bantuan donator, dan dana pribadi masih kurang baik. Karena masih terdapat sisa uang. Sementara itu, para donator yang menyumbang tentu saja mengharapkan adanya imbal balik dari H. Sukarmis sehingga ini kurang bagus dalam proses pemilihan umum.

2. Modal Sosial

Modal sosial adalah jaringan dan kepercayaan masyarakat yang dimiliki oleh H. Sukarmis, contohnya H. Sukarmis mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin Kabupaten Kuantan Singingi Selama Dua periode, sebagai Bupati. Untuk menilai modal social yang dimiliki oleh H. Sukarmis, maka dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti:

a. Interaksi Social dengan Masyarakat

Pada proses kampanye pemilihan anggota legislatif yang dilakukan oleh H. Sukarmis beserta tim suksesnya telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang, dan telah merangkul semua kalangan. Sehingga informasi tentang H. Sukarmis dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun, ada beberapa masalah terkait dengan ujaran kebencian, dan juga unsur sara yang dilakukan oleh simpatisan, maka itu diluar konteks kampanye yang dilakukan oleh H. Sukarmis dan tim suksesnya. Oleh karena itu, untuk masa yang akan datang, proses kampanye ini benar-benar diawasi oleh calon anggota legislatif dan tim suksesnya. Sehingga simpatisan yang kurang memahami peraturan kampanye tersebut dapat memahami dan menghindari kesalahan dalam proses kampanye.

b. Kepercayaan dari Masyarakat

Kepercayaan merupakan unsur yang paling penting dalam pemilihan calon anggota legislatif, maupun dalam proses pemilihan umum lainnya. Kepercayaan akan mendorong masyarakat untuk memilih atau tidak memilih calon anggota legislatif. Artinya calon yang diyakini oleh masyarakat bisa membawa aspirasi mereka, akan dipilih oleh masyarakat, begitupun sebaliknya calon yang kurang dipercaya oleh masyarakat tidak akan dipilih oleh masyarakat. Banyak kasus seperti korupsi dan lainnya yang menjerat para wakil rakyat

sehingga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat, namun permasalahan itu, kembali kepada calon anggota legislatif dan juga track record atau perjalanan karir politik calon tersebut.

Berdasarkan pada tanggapan tokoh masyarakat, maka dapat dilihat bahwa masyarakat sudah percaya akan visi misi H. Sukarmis Karena sudah terbukti pada saat menjadi Bupati. Namun untuk visi dan misi H. Sukarmis menjadi anggota legislatif, maka masyarakat masih perlu untuk diedukasi lagi, agar semakin mengenali visi dan misi h. serta mereka akan semakin percaya dengan visi dan misi tersebut.

Kepercayaan masyarakat terhadap H. Sukarmis ini terlihat dari penerimaan masyarakat atau sambutan dari masyarakat terhadap Beliau ketika menghadiri suatu acara, baik acara keagamaan, maupun acara adat. Berikut ini adalah beberapa gambar tentang sambutan masyarakat kepada H. Sukarmis pada saat mengikuti berbagai acara di Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Jaringan-Jaringan Sosial Yang Mendukung

Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya, baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Dengan kata lain, dengan menjadi anggota dari suatu kelompok orang akan memperoleh dukungan dari modal yang dimiliki secara kolektif. Selanjutnya ia mengatakan bahwa besarnya modal sosial yang dimiliki seorang anggota dari suatu kelompok tergantung pada seberapa jauh kuantitas maupun kualitas jaringan hubungan yang dapat diciptakannya, serta seberapa besar volume modal ekonomi, budaya dan sosial yang dimiliki oleh setiap

orang yang ada dalam jaringan hubungannya.**Invalid source specified.**

Berdasarkan pada pemaparan tanggapan tokoh masyarakat dan tokoh politik terhadap indikator modal social yang dimiliki oleh H. Sukarmis, maka dapat dilihat bahwa interaksi social yang terjadi antara H. Sukarmis dengan masyarakat sudah terjalin dengan baik semenjak H. Sukarmis menjabat sebagai Bupati Kuantan Singingi, sehingga beliau sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Namun untuk pencalonan H. Sukarmis sebagai anggota legislatif masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Sehingga sangat dibutuhkan adanya kampanye sebagai bentuk interaksi social dengan masyarakat. Dalam kampanye tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan informasi yang lengkap tentang visi, misi, serta program H. Sukarmis kalau terpilih menjadi anggota legislatif. Selain itu, untuk masalah kepercayaan dari masyarakat, H. Sukarmis masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, karena pernah menjabat Bupati Kuantan Singingi selama dua periode, tanpa ada terlibat masalah hukum. Jadi untuk menjadi calon legislatif, tentu masyarakat tidak ragu lagi, namun banyak dari masyarakat yang kurang mengetahui tentang visi dan misi yang diusung oleh H. Sukarmis mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sehingga mereka belum benar-benar percaya sebelum mengetahui dengan jelas tentang visi dan misi dari H. Sukarmis tersebut. Terakhir adalah terkait dengan dukungan dari jaring-jaring social, yaitu dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh partai. Pada saat mencalonkan diri, tokoh masyarakat sudah mengenal sosok H. Sukarmis dengan baik, sehingga H. Sukarmis mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat. Namun tidak seluruh tokoh masyarakat yang mau mendukung H.

Sukarmis sehingga diperlukan adanya kerja sama antara tim sukses H. Sukarmis dengan partai, agar seluruh kader partai mau untuk memperkenalkan H. Sukarmis kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kuantan Singingi. Sementara itu, jika dilihat dari tidak meratanya dukungan masyarakat, maka kita perlu melakukan kampanye terbuka untuk mendapatkan dukungan masyarakat di daerah-daerah yang dianggap kurang mendukung H. Sukarmis.

3. Modal Budaya

Modal budaya, memungkinkan kita untuk memperoleh kesempatan dalam hidup, karena modal budaya menghasilkan kesetaraan maupun ketidaksetaraan yang akan selalu termotivasi bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya untuk mencapai suatu kelas sosial tertentu. Contohnya H. Sukarmis merupakan salah satu tokoh masyarakat yang mendapat gelar Datuk Bagindo Kayo karena Bupati Sukarmis dianggap memberi perhatian penuh serta peran yang besar dalam meningkatkan pembangunan di kawasan Pucuk Rantau hingga mendukung terbentuknya kecamatan Pucuk Rantau pemekaran dari Kecamatan Kuantan Mudik. Selain itu, beliau juga diberikan Gelar Bapak Pembangunan oleh Drs. Hamdan, MS Dt Paduko Jolelo, Salah satu penghulu Kenegerian Simandolak Benai.

Melihat modal lain dari H. Sukarmis yakni memanfaatkan budaya masyarakat kuantan singing, yaitu tidak dapat terlepas dari adat istiadatnya, tradisi dan sistem kekerabatan, modal ini tidak kalah penting untuk membangun relasi dengan para pendukung yang harus terjalin, sehingga modal untuk memobilisasi dukungan pada saat berlangsungnya tahapan kampanye.

a. Adat istiadatnya

Tokoh adat berperan dengan memanfaatkan kharisma yang dimiliki

mensosialisasikan informasi pemilihan umum kepada masyarakat, membangun komunikasi dengan pasangan calon kemudian mendukungnya. Tokoh politik, tokoh agama maupun tokoh masyarakat atau adat sebagai elit lokal mempunyai karakteristik tersendiri untuk memberikan dukungan dalam pemilihan anggota legislatif. Peranan kaum elit sebagai pemegang sumber-sumber kekuasaan seperti sumber ekonomi, sosial budaya dan lain-lain, sehingga secara otomatis mereka dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu orang yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Elit lokal dalam pengaruhnya dapat memotori perilaku masyarakat untuk menetapkan pilihannya, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam pemilihan umum. (Fadli, 2018)

Berdasarkan pada pemaparan tentang tanggapan tokoh masyarakat terhadap kedekatan adat dalam pemilihan calon anggota legislatif, maka dapat dilihat bahwa ada tokoh masyarakat maupun masyarakat yang memberikan dukungan kepada H. Sukarmis. Namun, tidak semua tokoh masyarakat dan juga masyarakat yang memberikan dukungan, hal ini dikarenakan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki wilayah yang luas, latar belakang masyarakat yang beragam, baik dari segi agama, suku bangsa, dan juga organisasi keagamaan. Sehingga setiap suku, setiap organisasi keagamaan memiliki calon legislatif unggulannya masing-masing. Hal inilah yang harus di perhatikan oleh H. Sukarmis maupun tim suksesnya, agar setiap masyarakat, setiap organisasi keagamaan, setiap suku bangsa mau memilih H. Sukarmis sebagai anggota legislatif mewakili Kuantan Singingi di Provinsi Riau.

b. Tradisi dan sistem kekerabatan

Politik secara kekerabatan dan tradisi hampir sama dengan adat istiadat, karena pada politik kekerabatan dan tradisi ini lebih mementingkan aspek seperasaan, sepenaggungan dan saling memerlukan dalam memutuskan dukungan politik mereka. Oleh karena itu, peran penting dari seluruh tim sukses dan partai politik pengusung H. Sukarmis, agar memiliki kedekatan kekerabatan dengan masyarakat. Untuk menilai kedekatan hubungan kekerabatan antara H. Sukarmis dengan masyarakat, maka dapat dilihat dari dukungan dari kerabat terhadap H. Sukarmis pada pemilihan anggota legislatif periode 2019-2024.

Penerimaan oleh masyarakat terhadap seorang tokoh masyarakat menandakan bahwa tokoh masyarakat tersebut memiliki hubungan yang erat atau kedekatan secara adat, maupun secara tradisi dengan masyarakat tersebut, terlihat dari kegiatan H. Sukarmis dalam menghadiri kegiatan adat. Pada kedua acara tersebut, H. Sukarmis Nampak mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat, dan terlihat juga mereka memiliki ikatan emosional yang kuat dengan H. Sukarmis.

Melihat modal lain dari H. Sukarmis yakni memanfaatkan budaya masyarakat kuantan singingi, yaitu tidak dapat terlepas dari adat istiadatnya, tradisi dan sistem kekerabatan, modal ini tidak kalah penting untuk membangun relasi dengan para pendukung yang harus terjalin, sehingga modal untuk memobilisasi dukungan pada saat berlangsungnya tahapan kampanye. Sementara itu, untuk dukungan tradisi dan system kekerabatan, H. Sukarmis bisa memanfaatkan keluarga besarnya untuk menjadi basis-basis suara, misalnya keluarga dari anak menantu H. Sukarmis yang bisa menjadi relawan untuk memenangkan H. Sukarmis.

Berdasarkan pada tanggapan tentang modal budaya yang dimiliki, maka dapat dikatakan bahwa kedekatan budaya secara adat istiadat dan kedekatan kekeluargaan sudah terjalin dengan baik dengan masyarakat. Mengingat H. Sukarmis merupakan calon anggota legislatif yang berasal dari Kuantan Singingi, selain itu juga memiliki keluarga yang sangat besar. Namun untuk daerah Indragiri Hulu, beliau harus lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Walaupun Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi memiliki kedekatan secara adat istiadat, namun daerah tersebut tentu saja memiliki calon legislatif yang akan diusungnya. Oleh karena itu, H. Sukarmis harus lebih intensif lagi dalam mengkampanyekan diri di daerah Indragiri Hulu.

4. Modal Simbolik

Modal simbolik adalah jenis sumber daya yang dioptimalkan dalam meraih kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik sering membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor, prestise, gelar, status tinggi, dan keluarga ternama. Artinya modal simbolik di sini dimaksudkan sebagai semua bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara institusional atau non-institusional. Simbol itu sendiri memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas, yang mampu menggiring orang untuk mempercayai, mengakui dan mengubah pandangan mereka tentang realitas seseorang, sekelompok orang, sebuah partai politik, atau sebuah bangsa (Halim, 2014).

Berdasarkan pada hasil wawancara terkait dengan modal simbolik yang dimiliki oleh H. Sukarmis, maka dapat dilihat bahwa modal simbolik yang dimiliki oleh H. Sukarmis sudah bagus. Hal ini terlihat dari berbagai gelar adat yang diberikan oleh masyarakat, symbol kekayaan (seorang

pengusaha yang sukses), symbol keluarga (memiliki anak-anak dan kerabat sebagai pejabat pemerintah), dan lainnya. Sehingga modal simbolik yang dimiliki ini dapat membantu H. Sukarmis dalam menarik simpati masyarakat untuk memilihnya pada pemilihan anggota legislative tahun 2019.

G. SARAN

Adapun Saran yang dapat penulis sampaikan dalam rangka meningkatkan Penggunaan Modal politik oleh H. Sukarmis pada pemilihan umum legislatif 2019 Dapil VIII Riau sebagai berikut:

1. Para kontestan peserta pemilu legislatif yang telah terpilih sebagai wakil rakyat mesti tetap konsisten dalam memperjuangkan visi kerakyatan menjalankan fungsi governing dan representasi secara efektif serta delegator bagi rakyat di daerah pilihannya dan selalu hadir di tengah masyarakat ketika dibutuhkan.
2. Tim Sukses maupun partai pendukung harus mencari media kampanye yang paling efektif, dan mudah dijangkau oleh masyarakat, seperti media social facebook, instagram, whatsapp, dan lain sebagainya.
3. Jalin komunikasi dengan masyarakat setiap saat, walaupun telah terpilih sebagai anggota legislatif. Sehingga untuk masa yang akan datang masyarakat sudah mengenal dengan baik sosok H. Sukarmis.
4. Penggunaan dana kampanye harus dilakukan secara optimal, agar tidak ada dana kampanye yang tersisa, dan dimanfaatkan secara maksimal.
5. Sumber dana kampanye harus dikurangi dari donator yang bersifat badan usaha, karena akan berimbas pada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh anggota legislatif.
6. Selalu menceritakan keberhasilan karir politik, visi dan misi serta program pada setiap kegiatan kampanye, dan hindari adanya praktik kampanye yang dilarang.

7. Menjaga soliditas antara tim sukses dan juga antara tim sukses dan tim dari partai pendukung H. Sukarmis

H. DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaidillah, e. a. (2000). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Baharuddin, T. (2017). Modal politik Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi Kasus: Indah Putri Indriani Sebagai Bupati Terpilih Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan). *Journal Of Governance and Public Polcy Vol. 4. No 1 Februari 2017*, 1-19.
- Bandiyah. (2019). Review of Pierre Bourdieu in Political Practice of Dana Punia in The General Bali Governor Election 2018. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 367*, 118-121.
- Casey, K. L. (2018). Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu's Interconvertibility Theory . *University of Missouri-St. Louis*, 1-24.
- Fadli, M. (2018). Keterlibatan Elit Lokal Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015. *Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1-19.
- Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing politik* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Halim, A. (2014). *Politik Lokal; Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya*. Yogyakarta: LP2B.
- Komisi pemilihan umum Republik Indonesia. (2018). *Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 28*. Jakarta: Komisi pemilihan umum Republik Indonesia.
- Syahza, A. (2009). *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: CV Witra Irzani.
- Moh. Mahfud, M. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Potouw. (2010). Modal politik Dalam Kontestasi Politik (Studi tentang Modal politik dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan Maximiliaan Lomban pada Pemilu di Kota Bitung Sulawesi Utara . *Pascarajana Diponegoro University*, 1-14.

